

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai Mekanisme Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Haneda Sukses Mandiri maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

- a. Dalam melakukan pencatatan atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Haneda Sukses Mandiri, karyawan PT tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Akan tetapi, adanya terjadi kesalahan dalam *input* transaksi penjualan sehingga mempengaruhi PPN Keluaran pada PT. Haneda Sukses Mandiri. Oleh karena itu karyawan melakukan perbaikan pada bagian PPN Keluarannya.
- b. Pada perhitungan PPN terutang yang dilakukan oleh perusahaan mengalami lebih bayar pada bulan Mei sebesar Rp 7.790.000 dan bulan Juli sebesar Rp 1.131.433.
- c. PT. Haneda Sukses Mandiri telah melakukan pembayaran sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
- d. Dalam pelaporan SPT masa PPN selalu tepat waktu dan sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.



5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, saran yang dapat diambil sebagai berikut:

- a. Bagi PT. Haneda Sukses Mandiri peneliti menyarankan untuk lebih teliti dalam meng-*input* data transaksi penjualan sehingga dapat mengurangi risiko pembetulan PPN Keluaran di masa yang akan datang.
- b. Peneliti juga menyarankan kepada PT. Haneda Sukses Mandiri, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia terkhususnya di bagian atau departemen *Finance and Accounting* sehingga masa yang akan datang dapat meminimalisir terjadinya lebih bayar pada Pajak Pertambahan Nilai.
- c. Bagi peneliti selanjutnya yang hendak melakukan penelitian serupa, peneliti menyarankan agar peneliti selanjutnya dapat menambah informasi pengetahuan yang terbaharui dan dapat menjadi referensi untuk peneliti-penelitian selanjutnya.



Daftar Pustaka

- Asmadi, I., *et al.*, 2020, Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Lenko Surya Perkasa Kantor Pusat, *Jurnal AKRAB JUARA*, 5 (2): 73-83.
- Atfhal, M. (2018). Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pelaporan SPT Masa PPN Pada PT. Gotong Royong Jaya. *Skripsi*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Badan Pusat Statistik Jakarta Pusat. 2020. Realisasi Pendapatan Negara 2020-2022. Jakarta Pusat. Badan Pusat Statistik.
- Daud, A., *et al.* 2018. Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Nenggapratama Internusantara. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(2), 78–87.
- Deegan, C, 2004, Environmental Disclosures and Share Price – a Discussion about Efforts to Study this Relationship, *In Accounting Forum*, Vol 28, No, 1: 87-97.
- Iroth, S., Ilat, V., dan Wokas, H., 2017, Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. BKSS di Manado, *Jurnal EMBA*, 5(2), 1142–1151.
- Kacaribu, A., dan Vincent, E., 2022, Analysis Of The Value-Added Tax Implementation At PT. Intitera Primayudha, *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL AND MANAGEMENT STUDIES (IJOSMAS)*, 3(1), 344–350.
- Putri, V., dan Subandoro, A., 2022, Analisis Pengaruh Kenaikan Tarif PPN 11% Terhadap Penjualan Pada PT X, *Jurnal Revenue*, 3(1), 54–58.
- Rusydi, M., *et al.*, 2018, Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) di Makassar, *Jurnal Riset Perpajakan*, 1(2), 94–108.
- Sugiyono, 2020, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- _____, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang PPN dan PPnBM
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP).
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang PPh





- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang PPN dan PPnBM.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang BPHTB.
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh
Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
Waluyo, 2019, *Perpajakan Indonesia*, Edisi 12, Salemba Empat, Jakarta.